

LAPORAN MONEV RENCANA AKSITAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN TARGET				PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				JADWAL PELAKSANAAN				JADWAL PELAKSANAAN				Anggaran	Realisasi	Catatan Hasil Monev	Tindak lanjut	Penanggung jawab	
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					B1	B2	B3	Realisasi TW I	B4	B5	B6	Realisasi TW II	B7	B8	B9	Realisasi TW III						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13				13									
Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	0,690 Rasio	25%	25%	25%	25%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	14.23			5%	10,77%	15,77%	23.92%	3%	3.39%	30,31%					18,476,682,810					
							1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Meningkatnya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	40%			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					167,000,000					
							Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	Persiapan													167,000,000				Angkutan	
										2. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70%			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					378,730,000		
							Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Persiapan																	Pelayaran	
												5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					378,730,000					
Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah pelabuhan laut pengumpan regional	1 Pelabuhan					Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3,856 Trip				5,29%	5,45%	10,74%	16,35%	5,16%	9,05%	30,56%					11,621,507,500				
							1. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP), Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan yang memiliki RIP dan DLKR/DLKP	1 Pelabuhan				5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					952,040,000				
			25%	25%	25%	25%	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	Persiapan														952,040,000				Pelayaran
							2. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Pelabuhan				5%	5,22%	10,22%	15,65%	4,35%	10%	30%					210,000,000				
			25%	25%	25%	25%	-Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Peizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Peizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	Persiapan														53,320,000				UPTD PASDPL
												5%	5%	10%	20%	58%	0%	78%										

			25%	25%	25%	25%	-Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Pelabuhan	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan dan Pelayanan Proses Rencana Induk Pelabuhan (RIP)		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					7,925,000,000					TAA
							3. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Unit			5%	5%	10%	15%	8,73%	6,27%	30%					700,865,000					
			25%	25%	25%	25%	-Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen	Persiapan Lelang Masa Pelaksanaan Pekerjaan Serah Terima Hasil Pekerjaan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					178,365,000					Pelayaran
			25%	25%	25%	25%	- Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang melayani trayek antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang melayani trayek antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Persiapan Proses Lelang Pelaksanaan Pekerjaan Serah Terima Hasil Pekerjaan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					522,500,000					UPTD PASDPL
	3. Jumlah terminal type B	7 Terminal					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	14,23			5%	10,77%	15,77%	23,92%	3%	3,39%	30,31%					18,476,652,510					
							1. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang dikelola	7 Terminal			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					7,391,000,000					
			25%	25%	25%	25%	-Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	4 Terminal	Persiapan dan Lelang Pelaksanaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					6,843,500,000					UPTD Terminal
			25%	25%	25%	25%	-Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Rehabilitasi	4 Terminal	Persiapan Proses Lelang Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah terima hasil Pekerjaan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					547,500,000					UPTD Terminal
Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	69.10%					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi	90%	Persiapan dan Pemilihan Penyedia Pelaksanaan dan Memonitoring Evaluasi		6%	6,73%	12,73%	19%	14,51%	9,52%	43,03%					36,670,287,792					Sekretariat
	5. On Time Performance Layanan Transportasi	57.80%					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	14,23 Rasio			5%	10,77%	15,77%	23,92%	3%	3,39%	30,31%					18,476,652,510					
							1. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	80%			6,17%	3,83%	10%	19,17%	4,72%	6,11%	30%					475,000,000					
			25%	25%	25%	25%	- Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah ASN yang memiliki kompetensi Auditor dan Inspektur LLAJ	8 Orang	Persiapan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan		12%		10%	15%	5%	10%	30%					100,000,000					Angkutan

		25%	25%	25%	25%	-Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	Persiapan Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Pelaporan Hasil Kegiatan		5%	5%	10%	25%	5%	0%	30.00%					185,000,000					UPTD Terminal
		25%	25%	25%	25%	-Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan	Persiapan Pelaksanaan Tingkat Provinsi Pelaksanaan Tingkat Nasional		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					190,000,000					Angkutan
6. Load faktor penumpang kereta api	80%					Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah Penumpang Keretaapi	1.517.236 Orang			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					518,858,550					
						1. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Panjang Jaringan Jalur Keretaapi yang menjadi kewenangan provinsi	24 km			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					180,947,000					
	100%					- Sosialisasi dan Uji coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang jaringannya Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Persiapan dan Koordinasi Kegiatan Kampanye/Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang dan Pelatihan PJJ Penyusunan Laporan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					106,493,650					Keretaapi
						2. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Panjang Jaringan Jalur Keretaapi yang menjadi kewenangan provinsi	24 km			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					284,043,650					
	100%					- Sosialisasi dan Uji coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Persiapan dan Koordinasi Kegiatan Kampanye/Sosialisasi Pengguna Transportasi Massal Penyusunan Laporan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					180,947,000					Keretaapi
7. Load faktor penumpang kapal laut	9%					Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3,856 Trip			5,29%	5,45%	10,74%	16,35%	5,16%	9,05%	30,56%					11,621,507,500					
						1. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antarDaerah Kabupaten / Kota dalam daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk kapal yang melayani trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang memenuhi syarat perizinan	1 Unit			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					551,987,500					
	25%	25%	25%	25%		- Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang tersedia	1 Dokumen	Persiapan Lelang Masa Pelaksanaan Pekerjaan Serah Terima Hasil Pekerjaan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					551,987,500					Pelayaran
						2. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Pelabuhan			5%	5,22%	10,22%	15,65%	6,06%	9,03%	30,74%					8,769,720,000					

8. Load faktor penumpang Bus AKDP	70%	25%	25%	25%	25%	- Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Regional yang dipelihara	1 Pelabuhan	Peningkatan Pelayanan BLUD dari Segi Waktu Pemeliharaan dan Pelayanan Proses Pengelolaan BLUD	5%	5%	10%	20%	15%	35%	35%	791,400,000					Pelayaran
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	14,23		5%	10,77%	15,77%	23.92%	3%	3.39%	30,31%	18,476,652,510					
						1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	6 Unit		5%	5%	10%	15%	6,43%	9,71%	31,14%	5,075,155,423					
						-Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Provinsi	1 Laporan	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Kegiatan	5%	5%	10%	15%	55%	0%	70%	97,527,327					Angkutan
		25%	25%	25%	25%	- Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orangdan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Unit	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Kegiatan	5%	5%	10%	15%	6.43%	9.71%	31.14%	5.075,155,423					Angkutan
						2. Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40%		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	120,000,000					
		25%	25%	25%	25%	Sosialisasi Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Kegiatan	5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	120,000,000					Angkutan
						3. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Btas 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Meningkatnya Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40%		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	385,000,000					
		25%	25%	25%	25%	- Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Tryaek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Persiapan Proses Lelang Pelaksanaan Pekerjaan Serah Terima Hasil Pekerjaan	5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	385,000,000					Angkutan
						4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	52%		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	232,340,000					
9. Load faktor angkutan barang darat	69%	25%	25%	25%	25%	- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan aplikasi ke versi yang lebih baru terkait penambahan fitur, peningkatan kinerja, atau penyelesaian dengan sistem operasi terbaru dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Persiapan Proses Lelang Pelaksanaan Pekerjaan Serah Terima Hasil Pekerjaan	5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	232,340,000					Angkutan
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	14,23		5%	10.77%	15.77%	23.92%		30.31%	18,476,652,510						
						1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase terlaksananya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	80%		5.78%	4.22%	10%	15.56%	5.24%	9.20%	30%	562,000,800					
		25%	25%	25%	25%	- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	Menyiapkan SK, SPT, Daftar Hadir Melaksanakan Kegiatan Membuat Hasil Laporan Kegiatan dan Dokumentasi	5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	472,000,800					Angkutan

10. Load faktor angkutan barang laut	55%					Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3,856 Trip			5.29%	5.45%	10.74%	16.35%	5.16%	9.05%	30.56%						11,621,507,500					
						1. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Meningkatnya Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	70%			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%						58,165,000					
		25%	25%	25%	25%	- Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang jasa pengurusan transportasi angkutan perairan pelabuhan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut tali mandiri dan depo peti kemas dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Persiapan Pekerjaan (Menyiapkan SK,SPT dan Matrik Kegiatan)		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%						58,165,000				Pelayaran	
									Pelaksanaan Pekerjaan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%											
									Laporan Pekerjaan																			
							2. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Meningkatnya Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	35%			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%						210,000,000				
		25%	25%	25%	25%	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Persiapan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%						210,000,000				Pelayaran	
									Proses Lelang																			
									Pelaksanaan Pekerjaan																			
									Serah Terima Hasil Pekerjaan																			
11. Load faktor angkutan barang kereta	54%					Program Perkeretaapian	Jumlah Penumpang Keretaapi	1.517.236 Orang			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%						518,858,550					
						1. Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Izin Keretaapi khusus	1 Dokumen			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%						53,867,900					
					100%	-Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Sinkronisasi Data		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%						53,867,900				Keretaapi	
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi																			
							Penyusunan Laporan																					
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	14.23			5%	10.77%	15.77%	23.92%			30.31%						18,476,652,510					
						1, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2 Unit			5%	5%	10%	15%	6.43%	9.71%	31.14%						5,075,155,423					
									Penyiapan Dokumen KAK, HPS, Gambar Teknis dan Spesifikasi Teknis																			
							Menyerahkan dokumen - dokumen untuk proses pelelangan																					

Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	0,392 Rasio		50%	25%	25%	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		2 Unit	Proses Pelelangan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					4,041,256,287					Lalu Lintas
										Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan																		
										Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan																		
										Proses Pembayaran																		
							2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Titik Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Titik			5.78%	4.22%	10%	15.56%	5.24%	9.20%	30%					562,000,800					
		25%	25%	25%	25%		-Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1. Menyiapkan dokumen, SK Panitia, Surat Undangan, dan Bahan Rapat 2. Pelaksanaan Kegiatan Forum Lalu Lintas 3. Pembuatan Notulen Hasil Rapat		12%	3%	15%	20%	5%	5%	30%					90,000,000					Lalu Lintas
							3. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Meningkatnya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	33%			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					27,900,000					
			25%	25%	50%		-Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Andalalin	1 Laporan	1. Melakukan Inventarisasi terhadap Dokumen Andalalin yang sudah dikeluarkan 2. Melakukan Inventarisasi terhadap bangunan / gedung / pusat kegiatan yang sudah atau belum memiliki andalalin		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%					27,900,000					Lalu Lintas

PALEMBANG, 30 Juni 2025

KEPADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. H. ARINARSA JS
Kepala Dinas Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710603 199101 1 002